

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pembangunan ekonomi dalam sektor pertanian memiliki peranan yang penting bagi anggota masyarakat yang beradi di daerah negara berkembang untuk menyesuaikan dirinya agar tidak tergantung pada sektor pertanian. Cara ini bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan. Penyuluhan mempunyai peranan untuk keberhasilan laju pertumbuhan ekonomi pertanian maka peran seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Seorang PPL dituntut untuk memiliki kompetensi yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap, komunikasi dan keterampilan. (Arsyad 1999, hlm.76)

Kompetensi penyuluh saat ini perlu ditunjang dengan perkembangan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehinga tugas dan fungsi seorang PPL disesuaikan dengan kemajuan globalisasi sehingga lahirnya undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang “Sistem Penyuluhan Pertanian dan Perikanan dan kehutanan”. Kemajuan IPTEK bagi PPL merupakan momentum kebangkitan sistem penyuluhan di Indonesia. Undang undang tersebut merupakan kepastian hukum yang mengatur mulai dari sistem penyuluhan kelembagaan, tenaga penyuluh, penyelenggaraan penyuluh. Berdasarkan kebijakan otonomi daerah dalam kegiatan penyuluhan pertanian harus diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kelompok tani sehingga diharapkan kelompok tani binaannya akan lebih mandiri. Kegiatan penyuluhan ini perlu ditunjang oleh kompetensi tenaga penyuluh yang profesional sesuai dengan tindakan nyata yang lebih inovatif. Realitas kompetensi penyuluhan pertanian belum ada standar kompetensi yang jelas seolah penyuluhan dapat dilakukan oleh “siapa saja” dan dibenarkan dengan cara apa saja. Hal ini yang terjadi dan ini dan menjadi tantangan yang serius kedepan (Anwas,2009).

Merujuk pada undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) dan Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, salah satu kompetensi yang perlu dimiliki seorang penyuluh sebagai pendidik atau guru adalah kompetensi personal. Seorang penyuluh perlu memiliki kompetensi personal diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan tuntutan tugasnya sebagai penyuluh. Hal ini mengingat kompetensi merupakan karakteristik mendasar yang menentukan pencapaian hasil kerja sehingga tingkat kompetensi seseorang dapat digunakan untuk memprediksi hasil kerja yang akan dihasilkan (Huda, 2011).

Revitalisasi penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian yang mampu mendorong pelaku utama dan pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran dan elastisitas fungsi lingkungan hidup. Hal ini diperlukan usaha pemberdayaan petani melalui kemajuan ekonomi pertanian dalam menghadapi pangsa pasar global. Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2015, pertanian Indonesia didominasi oleh usaha kecil yang dilaksanakan oleh 26,5 juta rumah tangga petani yang merupakan 51% dari penduduk Indonesia berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktivitas yang rendah. Kondisi ini memberikan efek yang tidak menguntungkan pada persaingan pasar global. Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) pertanian diperlukan dalam peningkatan dan pengembangan pengetahuan kompetensi tenaga penyuluh sehingga mampu menjadi motor penggerak bagi petani atau kelompok tani binaannya. Berdasarkan data Kementerian Pertanian melalui Laporan Rencana Kerja PPSDMP dan Evaluasi E-Proposal (2015, hlm.32) keragaman tenaga penyuluh pertanian di Indonesia sebanyak 47.964 orang yang terdiri atas 27,485 Penyuluh PNS dan 20.479 Tenaga Harian Lepas–Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Penyuluh pertanian yang mengawal dan mendampingi petani/kelompok tani di tingkat desa sebanyak 32.229 dari 71.479 desa potensi pertanian, sehingga masih dibutuhkan penyuluh sebanyak 39.180 orang. Berdasarkan data tersebut penyuluh pertanian masih rendah.

Ketahanan pangan dan gizi merupakan satu kesatuan konsep dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang berkualitas. Dalam konteks ini, pembangunan pangan berupaya pemenuhan konsumsi gizi masyarakat berdasarkan kaidah Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Implementasi pendekatan ini membangun pangan dan gizi sebagai rangkaian

kegiatan lintas sektor mulai dari penyiapan infrastruktur, faktor produksi usaha pangan, proses produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, perdagangan, sampai pada peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya konsumsi pangan dengan prinsip B2SA (Kebijakan Strategis Pangan & Gizi Tahun 2015-2019).

Program B2SA merupakan program diversifikasi pangan yang telah dilaksanakan selama lebih dari 25 tahun, yaitu sejak pemerintahan Presiden Soeharto ternyata belum membuahkan hasil yang diharapkan. Substitusi pangan pokok terjadi bukan ke arah pemanfaatan pangan lokal tetapi ke bahan pangan impor (terigu). Padahal pengeluaran untuk pangan pokok masih sekitar 50% dari pengeluaran total konsumsi pangan. Konsumsi pangan penduduk Indonesia saat ini masih belum Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang ditunjukkan dengan nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) 83,4 pada tahun 2012. Berdasarkan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian menyatakan bahwa Tahun 2012-2025 diperlukan angka PPH 100 untuk mencapai angka ideal. Konsumsi pangan pokok masih tergantung satu bahan pangan saja sedangkan konsumsi pangan sumber protein, sayur dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral masih rendah.

Pola pikir (*mind set*) dan *culture set* sangat menngani pola konsumsi masyarakat selain adanya dominasi konsumsi atau bahan pangan pokok terdapat juga pandangan pangan inferior terhadap bahan pangan tertentu, yaitu umbi-umbian. Di sisi lain adanya globalisasi peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan kelas menengah dapat menngani pola konsumsi akibat pergeseran perilaku konsumsi pangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan pola konsumsi pangan melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) secara terus menerus. Upaya P2KPG harus berbasis pada pengutamaan peningkatan peran pangan lokal dan tetap mengacu pada kaidah B2SA. Selain memenuhi kaidah B2SA pangan tersebut juga harus aman untuk dikonsumsi masyarakat yaitu bebas dari cemaran maupun kontaminan serta halal sesuai persyaratan yang telah ditetapkan lembaga yang berkompeten. Hal ini perlu adanya promosi B2SA dilakukan secara terus menerus oleh seluruh *stakeholder* terkait.

Pelaksanaan Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di Kota Cimahi merupakan kegiatan yang mulai banyak dikembangkan terutama di kalangan ibu rumah tangga dengan melibatkan anggota KWT (Kelompok Wanita Tani) dari tingkat Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan Kecamatan sampai tingkat Kota. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan dan Pertanian (DISKOPINDAGTAN) Kota Cimahi bekerjasama dengan KWT (Kelompok Wanita Tani) dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan mental yang kuat, kesehatan yang prima serta cerdas. Berdasarkan data Kementerian Pertanian Tahun 2015 menunjukkan kualitas SDM dilihat dari status gizi yang ditentukan langsung oleh faktor konsumsi pangan dan tidak rentan terhadap penyakit hal ini dipengaruhi pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi dan budaya.

Konsumsi pangan sebagai faktor berpengaruh langsung terhadap status gizi sehingga perlu mendapatkan perhatian berupaya untuk membiasakan keluarga agar selalu mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan jumlah dan komposisi yang seimbang. Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi inovasi pangan B2SA. Pihak DISKOPINDAGTAN Kota Cimahi sejak tahun 2012 telah mensosialisasikan pola konsumsi B2SA melalui Program P2KP dalam bentuk kegiatan “Sekolah Jum’at”.

Kota Cimahi merupakan kota yang terdiri dari tiga kecamatan dan lima belas kelurahan dengan jumlah penduduk 500.000 jiwa. Secara umum kota Cimahi merupakan wilayah industri. Kegiatan industri di Kota Cimahi didominasi oleh tekstil, sandang dan kulit sehingga penyuluh pertanian melihat potensi *on farm* maupun *off farm* untuk pemberian penyuluhan B2SA kepada anggota KWT. Dukungan pemberian penyuluhan inovasi B2SA terhadap perbaikan diversifikasi pangan untuk mengurangi konsumsi beras dan non-terigu.

Implementasi penerimaan inovasi B2SA pada tahun 2012 dapat disosialisasikan namun kemampuan menangkap sosial tersebut terbilang cukup lambat. Sehingga Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi Tahun 2015–2019 serta pencapaian visi misi BPP Kota Cimahi sebagai tempat pelatihan para penyuluh dan pelaku usaha pertanian menjadi SDM yang mandiri dan profesional di bidang

pertanian dengan salah satu misinya yaitu, mengembangkan sistem dan metodologi pelatihan, serta penyerapan teknologi atau inovasi baru. Hal tersebut dalam pelaksanaannya kota Cimahi secara terus menerus aktif melaksanakan koordinasi lintas Balai Penyuluhan Pertanian dan organisasi masyarakat tani seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam pemberian sosialisasi kaidah pangan B2SA.

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengalaman di lapangan maka peneliti ingin mengungkapkan apakah benar terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi penyuluh pertanian lapangan dengan penerimaan inovasi B2SA (Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman) oleh anggota KWT (Kelompok Wanita Tani) di Kota Cimahi.

B. Rumusan Masalah

Sebelum menentukan rumusan masalah peneliti menjabarkan terlebih dahulu identifikasi masalah dari latar belakang masalah dimana terdapat beberapa pokok masalah yang akan di kaji, antara lain :

1. Berdasarkan data dari DISKOPINDAGTAN Tahun 2014 bahwa Lingkungan Kota Cimahi berpotensi untuk membudidayakan tanaman alternatif pangan seperti ubi kayu, ubi jalar, ganyong dan sukun namun kurangnya pemahaman KWT dalam membudidayakan tanaman tersebut menjadi kendala dalam pengolahannya.
2. Berdasarkan data dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kota Cimahi Tahun 2014-2015 bahwa lahan untuk perkebunan pangan sudah sangat sempit sehingga pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah dilaksanakan oleh anggota KWT untuk membudidayakan alternatif pangan.
3. Pihak DISKOPINDAGTAN Kota Cimahi sejak tahun 2012 telah mensosialisasikan pola konsumsi B2SA namun Anggota KWT belum memahami kandungan gizi yang bermanfaat dalam alternatif pangan seperti ubi kayu, ubi jalar, ganyong dan sukun .
4. Berdasarkan RENSTRA 2015-2019 tentang ketahanan pangan bahwa Program B2SA ini dapat meningkatkan ketahanan pangan sebagai bahan makanan pengganti padi.

5. Berdasarkan pedoman Lomba Cipta Menu B2SA di Pemkot Cimahi Tahun 2014 Pola konsumsi pangan masyarakat Kota Cimahi masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenis pangan dan keseimbangan gizinya oleh sebab itu program B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dipandang sebagai inovasi dengan ide baru.
6. Berdasarkan Rencana Kerja BPPSDMP Tahun 2015-2019 Penyuluh Pertanian Lapangan memiliki kompetensi yang belum maksimal dalam memberikan inovasi kepada anggota KWT karena keterbatasan Sumber Daya Manusia.
7. Berdasarkan data dari DISKOPINDAGTAN Tahun 2015 bahwa jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang berstatus PNS 1 orang selain itu 7 orang penyuluh lainnya berstatus TBPP (Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) sehingga tugas seorang PPL merupakan kemampuan dasar dalam penentuan pencapaian hasil kerja sehingga tingkat kompetensi seorang PPL dapat digunakan untuk penilaian hasil kerja yang dihasilkan.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan kompetensi penyuluh pertanian lapangan dengan penerimaan inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi. Selain itu peneliti mencoba memberikan rumusan masalah akan dijabarkan melalui tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan latar belakang anggota KWT dengan penerimaan inovasi B2SA di Kota Cimahi?
2. Bagaimana hubungan kompetensi generik dengan kompetensi bidang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kota Cimahi?
3. Bagaimana hubungan kompetensi generik Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan penerimaan inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi?
4. Bagaimana hubungan kompetensi bidang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan penerimaan inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi?
5. Bagaimana hubungan kompetensi generik dan kompetensi bidang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan penerimaan inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi?

C. Tujuan Penelitian

Tiara Intania, 2016

HUBUNGAN KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DENGAN PENERIMAAN INOVASI B2SA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui hubungan kompetensi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi. Sedangkan tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut.

1. Memperoleh kejelasan dan pembuktian perbedaan latar belakang anggota KWT dengan penerimaa inovasi B2SA di Kota Cimahi.
2. Memperoleh kejelasan dan pembuktian hubungan kompetensi generik dengan kompetensi bidang PPL di Kota Cimahi.
3. Memperoleh kejelasan dan pembuktian hubungan kompetensi generik PPL dengan penerimaan inovasi B2SA oleh anggota KW di Kota Cimahi.
4. Memperoleh kejelasan dan pembuktian hubungan kompetensi bidang PPL dengan penerimaan inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi.
5. Memperoleh kejelasan dan pembuktian hubungan kompetensi generik dan bidang PPL dengan penerimaan inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan konsep kompetensi, difusi dan inovasi sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran yang dilihat dari hubungan kompetensi penyuluhan pertanian dengan penerimaan inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai pemanfaatan dalam mengimplementasikan metodologi penelitian mengenai hubungan kompetensi penyuluh pertanian dengan pemberian inovasi B2SA oleh anggota KWT di Kota Cimahi
- b. Bagi lembaga Balai Penyuluhan Pertanian, DISKOPINDAGTAN, Memberikan sumbangan pemikiran yang bergerak dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) terutama pembinaan dan pengembangan sumber daya petani.

3. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, dapat menjadi bahan bacaan ilmiah dan rujukan informasi yang diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai hubungan kompetensi Penyuluh Pertanian dengan penerimaan inovasi B2SA.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Panduan Karya Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2015, hlm.25) Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas:

Bab I Pendahuluan, mengungkapkan latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, yang berisi uraian tentang konsep dan teori yang mendukung terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, membahas uraian beisikan desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, mengungkapkan simpulan, implikasi serta rekomendasi yang merupakan penjelasan akhir.